**Makalah Sejarah Indonesia**

“POLITIK PINTU TERBUKA”

kelompok 6

* Amanda azallia
* annisa nadia nur ‘aqilah
* ari widya rahmawati
* indah nur alifah
* rizda annisa
* sopie halimah

xi rekayasa perangkat lunak

**Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunianya kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Politik Pintu Terbuka” dengan lancar. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Segala upaya telah kami lakukan untuk menyempurnakan makalah ini dan kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan demikian, sekiranya pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Semoga dengan ditulisnya makalah ini membawa manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 18 Agustus 2015

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kata Pengantar** | **………………………………………………………………….** | **I** |

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Agraria dan Undang – undang gula tahun 1870, maka golongan liberal di Eropa yang terdiri atas pengusaha menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka membuka berbagai macam perkebunan yaitu tebu, teh, tembakau, kina, nila, dan kopra.

Sebagai penunjang maka dibangun sarana dan prasarana seperti irigrasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan dermaga. Pembangunan prasarana perhubungan tersebut dibangun dengan kerja rodi yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Rakyat Pulau Jawa juga mengalami kemerosotan dalam kemakmuran, kemerosotan tersebut disebabkan :

1. Produksi bahan makanan semakin berkurang
2. Kerja Rodi terus berlanjut
3. Sistem perpajakan yang memberatkan rakyat
4. Adanya krisis perkebunan tahun 1885

Dilain pihak politik pintu terbuka sangat menguntungkan pengusaha asing, yaitu :

1. Perkebunan berkembang pesat
2. Keuntungan pengusaha asing cukup besar
3. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke negeri Belanda

**BAB 2**

**PEMBAHASAN**

1. Pengertian Politik Pintu Terbuka

Politik pintu terbuka berarti pemilik modal swasta diizinkan masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.

Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialism kuno (*ancient imperialism*), yaitu dikeruk kekayaannya saja. Setelah tahun 1870, di Indonesia diterapkan imperialism modern (*modern imperialism*). Sejak saat itu diterapkan*opendeur politiek*, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan system politik ekonomi terbuka.

1. Latar Belakang Diterapkannya Sistem Ekonomi Terbuka Di Indonesia Pada Tahun 1870
2. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi memberikan keuntungan besar bagi Pemerintah Hindia Belanda.
3. Berkembangnya paham terbukaisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
4. Kemenangan Partai Terbuka dalam Parlemen Belanda yang mendesak Pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi terbuka di negeri jajahannya (Indonesia). Hal itu dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Terbuka dapat menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi terbuka di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat mananamkan modalnya di Indonesia.
6. Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Terbuka
7. Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.
8. Suiker Wet (Undang-Undang Gula)

* Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan
* Pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta.

1. Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.

* Tanah di Indonesia dibedakan atas tanah rakyat dan tanah pemerintah.
* Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa tidak bebas.
* Tanah tidak bebas adalah tanah yang dapat disewakan kepada pengusaha swasta.
* Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.
* Tanah pemerintah dapat disewakan kepada pengusaha swasta hingga 75 tahun.

Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti berikut:

* Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
* Rakyat menderita dan miskin.
* Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor dan impor.
* Timbul pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.
* Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik.

1. Agrarische Besluit (1870). Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.

Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan.

Berikut ini beberapa perkebunan asing yang muncul:

1. Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.

2. Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Perkebunan kina di Jawa Barat.

4. Perkebunan karet di Sumatra Timur.

5. Perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara.

6. Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

1. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Terbuka

Pelaksanaan system politik ekonomi terbuka di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah kolonial Belanda menerapkan imperialisme modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut.

* Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di Eropa.
* Mendapatkan tenaga kerja yang murah.
* Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
* Menjadi tempat penanaman modal asing.

Seiring dengan pelaksanaan system politik ekonomi terbuka, Belanda melaksanakan Pax Netherlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa Barat lainnya. Lebih-lebih setelah dibukanya Terusan Suez (1868) yang mempersingkat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia.

1. Dampak Positif Dan Negatif Diterapkannya Sistem Ekonomi Terbuka Di Indonesia Pada Tahun 1870 Bagi Rakyat Indonesia

* ***Bagi Belanda***

1. Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda
2. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda
3. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

* ***Bagi Rakyat Indonesia***

1. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan.
2. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia.
3. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Pendapatan penduduk Jawa pada awal abad ke-20 untuk setiap keluarga dalam satu tahun sebesar 80 gulden. Dari jumlah tersebut masih dikurangi untuk membayar pajak kepada pemerintah sebesar 16 gulden. Oleh karena itu, penduduk hidup dalam kemiskinan.
4. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat buruk bagi penduduk.
5. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat.
6. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa.
7. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api.
8. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan *Poenate Sanctie.*
9. Rakyat pedesaan mulai mengenal arti pentingnya uang.
10. Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting.
11. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia.
12. Terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja
13. Penduduk semakin bertambah,sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan dimana-mana.

**Bab 3**

**Lampiran**

**BAB 4**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik Belanda. Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan. Kemenangan itu diperoleh secara mutlak pada tahun 1870, sehingga tanam paksa dapat dihapuskan. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi saja. Sistem ini akan menumbuhkan persaingan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan di Indonesia. Dengan demikian pendapatan negara juga akan bertambah. Untuk mewujudkan sistem tersebut, pada tahun 1870 di Indonesia dilaksanakan politik kolonial liberal atau sering disebut “politik pintu terbuka” (open door policy).

Sejak saat itu pemerintahan Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha swasta asing untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Pelaksanaan sistem liberal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang De Waal, yaitu Undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula.

Kesimpulannya, penghapusan tanam paksa dan diganti dengan Politik Pintu Terbuka tidak mengubah kehidupan rakyat. Rakyat tetap diperas. Yang berbeda hanyalah pelaku pemerasnya. Pada zaman tanam paksa,rakyat diperas oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan pada zaman Liberalisme yang melahirkan Politik Pintu terbuka,rakyat diperas oleh para pengusaha swasta Eropa. Van den Bosh sebagai tokoh tanam paksa memandang Hindia Belanda (Indonesia) sebagai “perusahaan milik negara”. Sedangkan kaum liberal memandang Hindia Belanda (Indonesia) sebagai “perusahaan milik swasta”.

Maka pada akhir abad ke-19, munculah kritik-kritik tajam yang di tujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktek liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia dan menganjurkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia melalui Sistem politik yang baru atas anjuran Mr.C.Th. Van Deventer yang dikenal dengan nama Politik Balas Budi. Inilah akhir dari sistem politik pintu terbuka yang ternyata dalam prakteknya tidak banyak mengubah taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan manusiawi.

1. **SARAN**

Dengan keterbatasan sumber yang dianalisis penulis, pembaca dianjurkan untuk membaca lagi sumber atau informasi yang berkaitan dengan topic yang dibahas, baik dari sumber teks (buku) ataupun media elektronik.

**DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.google.co.id>

<http://tugasakukamu.blogspot.com/2014/10/latar-belakang-politik-pintu-terbuka.html>

<https://sejumoffc2011.wordpress.com/2013/12/07/m-zaky-azymah/>